

Efektivitas Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro

Muhammad Hafidz¹, Hafys Sanjaya², Maun Jamaludin³

¹Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro, Lampung, ²Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Lampung, ³Universitas Pasundan, Bandung

Email: muhammadhafidz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif dari unsur aparatur pemerintah, camat, lurah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, efektivitas pembinaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi internal, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, serta tingkat kepuasan aparatur yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pembinaan memerlukan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sumber daya, digitalisasi layanan, serta peningkatan koordinasi dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, dan Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of sub-district and urban village guidance conducted by the Government Administration Division of the Regional Secretariat of Metro City and to identify factors influencing its implementation. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Informants were purposively selected from government officials, sub-district heads, village heads, and community members. The findings indicate that the guidance programs have contributed to improvements in administrative performance and public service delivery. However, their effectiveness is constrained by limited human resource capacity, insufficient budget allocation, weak internal coordination, low utilization of information technology, and uneven levels of employee satisfaction. The study concludes that enhancing the effectiveness of guidance requires strengthening human resource capacity, optimizing resource management, implementing digital-based services, and improving coordination and evaluation mechanisms to ensure sustainable local governance performance.

Keywords: Effectiveness, Guidance, and Local Government.

Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan

yang berada paling dekat dengan warga, sekaligus menjadi ujung tombak implementasi kebijakan pemerintah daerah (Speer, 2012). Kualitas kinerja kecamatan dan kelurahan sangat menentukan persepsi publik terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan (Lanin & Hermanto, 2019).

Upaya peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan tidak dapat dilepaskan dari peran pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembinaan dimaknai sebagai serangkaian tindakan sistematis yang mencakup penguatan sumber daya manusia aparatur, penataan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dan pengawasan. Melalui pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan kecamatan dan kelurahan mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal (Criado & Villodre, 2021).

Namun demikian, dinamika penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai permasalahan masih ditemukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, antara lain keterbatasan kompetensi aparatur, dukungan anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarunit kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum maksimalnya kualitas pelayanan publik dan rendahnya kepuasan masyarakat (Andrews et al., 2020).

Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu daerah otonom terus berupaya meningkatkan kinerja kecamatan dan kelurahan melalui berbagai program pembinaan yang dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Program tersebut mencakup pembinaan administratif, teknis, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan program pembinaan tersebut masih memerlukan evaluasi mendalam untuk menilai sejauh mana tujuan pembinaan telah tercapai dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan pembinaan kecamatan dan kelurahan di Kota Metro agar lebih adaptif, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dinilai efektif apabila hasil yang diperoleh selaras dengan sasaran yang direncanakan, baik dari sisi kualitas maupun manfaat yang dihasilkan (Islam et al., 2019). Dalam konteks administrasi publik, efektivitas tidak hanya diukur dari terpenuhinya target kerja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata (Saputro & Syaebani, 2024).

Efektivitas juga berkaitan erat dengan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan keluaran yang optimal. Pencapaian tujuan menjadi indikator utama, sementara penggunaan sumber daya berperan sebagai faktor pendukung

(Gasco-Hernandez et al., 2018). Dengan demikian, efektivitas menekankan pada hasil akhir (outcome) yang dicapai, bukan semata-mata pada besarnya input yang digunakan dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Bhat, 2024).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, efektivitas menjadi ukuran penting untuk menilai kinerja aparatur dan keberhasilan pelaksanaan program. Pemerintahan yang efektif ditandai dengan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, serta mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Patel & Jalota, 2023).

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

Pembinaan kecamatan dan kelurahan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (Fafurida et al., 2023). Kecamatan dan kelurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga memerlukan pembinaan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal (Giroth et al., 2022).

Pembinaan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, perbaikan sistem administrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung (Iqbal et al., 2024). Melalui pembinaan yang terarah, aparatur kecamatan dan kelurahan diharapkan memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang memadai untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara professional (Krpalek et al., 2021).

Selain berorientasi pada aparatur, pembinaan kecamatan dan kelurahan juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting agar kebijakan dan program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal serta mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga (Sabet & Khaksar, 2024).

Efektivitas Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

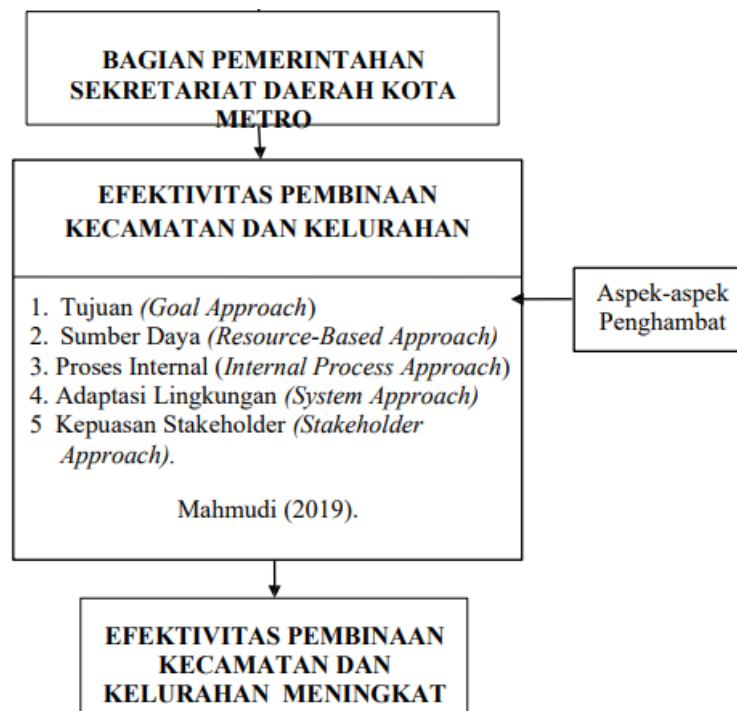
Efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan menunjukkan sejauh mana upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik di tingkat lokal (Madubun, 2024). Pembinaan dikatakan efektif apabila menghasilkan perubahan positif, baik dalam aspek kemampuan aparatur, tata kelola pemerintahan, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan (Wibisono et al., 2025).

Efektivitas pembinaan tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, koordinasi antarunit kerja, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan dengan baik. Tanpa dukungan faktor-faktor tersebut, pembinaan cenderung bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan (Laisa et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan menjadi indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Fatimah et al., 2024). Pembinaan yang efektif akan memperkuat peran kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta

mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Hariyati et al., 2021).

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan, khususnya dalam menelaah proses pembinaan, capaian pelaksanaan, serta berbagai kendala yang dihadapi. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan dan praktik pembinaan dijalankan serta sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu pejabat dan aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembinaan kecamatan dan kelurahan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dokumen internal, serta arsip resmi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen guna memastikan kelengkapan serta kedalaman informasi yang diperoleh (Firman, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai

dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan penafsiran. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang memadai (Arikunto, 2017). Penelitian ini dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi terhadap tujuan dan konteks penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pembinaan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro

Tujuan (Goal Approach)

Sebagai entitas pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, kecamatan dan kelurahan berperan krusial dalam mengelola pembangunan dan memberikan pelayanan publik, dan memastikan agar kebijakan daerah dapat terlaksana secara optimal di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan kinerja aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan. Efektivitas pembinaan tersebut dinilai melalui beberapa dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, integrasi dan koordinasi internal, serta tingkat kesejahteraan dan motivasi aparatur yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, hasil wawancara dengan pejabat, camat, lurah, dan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah memberikan dampak positif, terutama dalam perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mulai tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun demikian, pencapaian tujuan pembinaan masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal, lemahnya pengelolaan keuangan, serta ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan pelayanan publik juga menjadi tantangan yang menghambat efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta komitmen bersama dari pemerintah daerah agar pembinaan lebih adaptif, sinergis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sumber Daya (Resource-Based Approach)

Pemerintahan daerah memegang peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang berjalan dengan efektif dan efisien, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Dalam struktur pemerintahan daerah, Kecamatan dan Kelurahan berperan sebagai perpanjangan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik. Agar tugas dan fungsi ini dapat dilaksanakan dengan maksimal,

dibutuhkan suatu sistem pembinaan yang tepat dan efektif dari pemerintah daerah (Sumar et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, khususnya melalui pembinaan kecamatan dan kelurahan sebagai unit pelayanan terdepan. Pembinaan telah dilaksanakan secara rutin oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro melalui pelatihan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Namun demikian, efektivitas pembinaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pembinaan secara menyeluruh.

Berdasarkan perspektif Resource-Based Approach (RBA), efektivitas pembinaan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta regulasi pendukung. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penguasaan administrasi pemerintahan dan pemahaman regulasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan pembinaan cenderung bersifat teoritis dan kurang aplikatif dalam praktik pelayanan publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah kota dan perangkat kecamatan serta kelurahan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan yang efektif. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang lebih berbasis praktik, peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas, serta optimalisasi teknologi informasi guna meningkatkan koordinasi dan efisiensi pembinaan. Dengan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, pembinaan kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Proses Internal (Internal Process Approach)

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro memiliki peran strategis dalam membina dan memastikan kinerja kecamatan serta kelurahan berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Sebagai unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, keberhasilan kecamatan dan kelurahan sangat ditentukan oleh tingkat integrasi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara internal telah terbangun koordinasi yang cukup baik, meskipun komunikasi antarunit masih menghadapi berbagai kendala.

Integrasi internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan. Kerja sama yang baik antarunit mampu mempercepat penyelesaian masalah dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa lemahnya koordinasi, komunikasi yang belum optimal, tumpang tindih kewenangan, serta sistem pengawasan dan evaluasi kinerja yang belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan dan belum optimalnya kualitas layanan kepada masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas kepemimpinan, budaya organisasi, serta sistem kerja yang transparan menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi internal. Kurangnya

sinergi, ego sektoral, dan birokrasi yang bersifat hierarkis kerap menghambat kolaborasi lintas unit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi internal melalui peningkatan komunikasi terstruktur, kejelasan pembagian tugas, pelatihan aparatur, serta intensifikasi forum koordinasi. Dengan integrasi internal yang lebih solid, pembinaan kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang responsif serta berkualitas.

Adaptasi Lingkungan Berbasis Sistem

Kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Metro, sehingga efektivitas pembinaannya menjadi prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro berfungsi mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan dan kelurahan relatif responsif terhadap perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat, namun kesiapan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama, khususnya dalam mengadopsi teknologi dan sistem administrasi baru.

Efektivitas pembinaan ditentukan oleh kemampuan pencapaian tujuan serta tingkat adaptasi terhadap lingkungan pemerintahan yang dinamis. Pembinaan yang dilakukan melalui pelatihan, pemantauan rutin, serta pendampingan telah memberikan dampak positif, meskipun masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan pengelolaan data, serta belum optimalnya kerja sama dengan pemangku kepentingan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan agar kecamatan dan kelurahan lebih adaptif terhadap perubahan.

Untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan sistem perencanaan berbasis data, penguatan monitoring dan evaluasi kinerja, serta optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan praktis dan evaluasi berkala, serta penguatan koordinasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan pembinaan. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan komitmen bersama, pembinaan kecamatan dan kelurahan diharapkan tidak hanya mencapai target administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

Kepuasan Stakeholder (Stakeholder Approach)

Pembangunan kecamatan dan kelurahan yang efektif memerlukan aparatur pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Metro memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan membina kecamatan serta kelurahan, di mana tingkat kepuasan individu dalam organisasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan aparatur dipengaruhi oleh kerja sama tim, dukungan pimpinan, serta sistem pembinaan yang terstruktur dan berjalan secara konsisten.

Kepuasan kerja berkontribusi langsung terhadap motivasi dan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan. Meskipun secara umum aparatur merasa cukup puas, masih ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi kepuasan individu, seperti sistem manajemen sumber daya manusia yang belum optimal, distribusi beban kerja yang tidak merata, keterbatasan fasilitas

kerja, minimnya penghargaan dan insentif, serta tingginya tuntutan pelayanan publik. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan motivasi dan efektivitas kinerja apabila tidak ditangani secara sistematis.

Untuk meningkatkan kepuasan individu dalam organisasi, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan kesejahteraan pegawai, perbaikan lingkungan dan fasilitas kerja, penguatan sistem penghargaan dan pengembangan karier yang adil, serta komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan aparatur. Dukungan organisasi yang memadai, baik secara administratif maupun emosional, diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kepuasan dan loyalitas aparatur, serta mendorong efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan secara berkelanjutan.

Aspek-Aspek Yang Menghambat

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu: (1) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya, baik anggaran, tenaga aparatur, maupun fasilitas pendukung dalam mendukung pelaksanaan program kerja; (2) rendahnya kemampuan organisasi dalam merespons perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, yang ditandai dengan keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan; (3) masih adanya ego sektoral serta ketidaksinkronan kewenangan antarunit kerja; (4) lemahnya sistem komunikasi internal yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara efektif dan tepat waktu; serta (5) distribusi tugas yang belum proporsional sehingga menimbulkan ketimpangan beban kerja di antara aparatur.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan kecamatan dan kelurahan dipengaruhi oleh ketercapaian tujuan, ketersediaan sumber daya, kualitas proses internal, kemampuan adaptasi terhadap lingkungan, serta tingkat kepuasan aparatur. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran yang belum optimal, lemahnya koordinasi dan komunikasi antarunit, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta ketidakseimbangan beban kerja dan minimnya penghargaan menjadi faktor utama yang menghambat kinerja pembinaan.

Dalam meningkatkan efektivitas pembinaan, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih proporsional, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi dan kejelasan pembagian tugas antarunit kerja. Pemberian penghargaan dan penyeimbangan beban kerja juga penting untuk meningkatkan motivasi aparatur sehingga pembinaan kecamatan dan kelurahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andrews, R., Ferry, L., Skelcher, C., & Wegorowski, P. (2020). Corporatization in the Public Sector: Explaining the Growth of Local Government Companies. *Public Administration Review*, 80(3), 482–493. <https://doi.org/10.1111/puar.13052>
- Arikunto, S. (2017). *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*.

- Bhat, Z. H. (2024). Evaluating training effectiveness in India: Exploring the relationship between training components, metacognition and learning outcomes. *International Journal of Training and Development*, 28(1), 86–117. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12311>
- Criado, J. I., & Villodre, J. (2021). Delivering public services through social media in European local governments. An interpretative framework using semantic algorithms. *Local Government Studies*, 47(2), 253–275. <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1729750>
- Fafurida, F., Purwaningsih, Y., Mulyanto, M., & Suryanto, S. (2023). Tourism Village Development: Measuring the Effectiveness of the Success of Village Development. *Economies*, 11(5), 133. <https://doi.org/10.3390/economies11050133>
- Fatimah, M., Haryanto, H., & Dwi Retnandari, N. (2024). Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between Autonomy and Control. *Policy & Governance Review*, 8(2), 131. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922>
- Firman, F. (2018). *Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*.
- Gasco-Hernandez, M., Martin, E. G., Reggi, L., Pyo, S., & Luna-Reyes, L. F. (2018). Promoting the use of open government data: Cases of training and engagement. *Government Information Quarterly*, 35(2), 233–242. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.003>
- Giroth, N. K., Mandagi, M., & Bogar, W. (2022). Public Service Performance of Civil Servants (PNS) at South Tondano District Office in Minahasa Regency. *Journal of Social Science*, 3(1), 157–170. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i1.286>
- Hariyati, D., Holidin, D., & Mulia, I. C. (2021). Centralized Local Development versus Localized Central Arrangement in Village Autonomy Policy Implementation in Indonesia. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11275>
- Iqbal, S., Moosa, K., & Taib, C. A. Bin. (2024). Optimizing quality enhancement cells in higher education institutions: analyzing management support, quality infrastructure and staff training. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 41(6), 1572–1593. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-01-2021-0007>
- Islam, N., Mridha, E. M., Sharna, J. S., Rahman, N., Mosharraf, M., & Nower, N. (2019). An Evaluation of the Effectiveness of Employee Training in the Government Banks of Bangladesh. *10th International Conference on "Developing Organizations for the Future: Re-Interpreting the Modern Business Landscape" at: ICFAI Business School, Bangalore, Karnataka, India.*, 1. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11062.65609>
- Krpalek, P., Berkova, K., Kubišová, A., Krelová, K. K., Frendlovská, D., & Spiesová, D. (2021). Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. *Sustainability*, 13(10), 5533. <https://doi.org/10.3390/su13105533>

- Laisa, L., Abdussamad, J., & Tahopi, R. (2025). Quality of Village Administration Services Based on Electronic Government in Sipatana District, Gorontalo City. *International Journal Papier Public Review*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v6i1.345>
- Lanin, D., & Hermanto, N. (2019). The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 377–392. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0151>
- Madubun, J. (2024). Public services in island sub-districts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*, 83(3), 308–327. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586>
- Patel, A. K., & Jalota, S. (2023). Self-help groups in India: effectiveness of government support programs towards reducing NPAs. *International Journal of Governance and Financial Intermediation*, 1(4), 287–303. <https://doi.org/10.1504/IJGFI.2023.131490>
- Sabet, N. S., & Khaksar, S. (2024). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. *The Social Science Journal*, 61(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782649>
- Saputro, K., & Syaebani, M. I. (2024). The Influence of Pre-Training Factors on Training Effectiveness Mediated by Motivation to Learn, Motivation to Transfer, and Self-Efficacy – Case Study on Non-Ministerial Government Institutions. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(3), 658–669. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems2646>
- Speer, J. (2012). Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services? *World Development*, 40(12), 2379–2398. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.034>
- Sumar, W. T., Ilham, A., & Marhawati, B. (2022). Evaluation of The Government's Internal Quality Control System in the Implementation of Good Governance. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(3), 539–553. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i3.386>
- Wibisono, N., Asnawi, N., & Ekowati, V. M. (2025). Improving Village Government Performance through Village Financial Management, Good Village Governance, and Knowledge Management. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(2), 164–177. <https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p164-177>